

## **PENGHAPUSAN IRAK DARI DAFTAR KEBIJAKAN ANTI IMIGRAN MUSLIM PADA MASA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP**

**Arisna Supiani Putri <sup>1</sup>**  
**NIM. 1302045203**

### ***Abstract***

*This research aims to explain the reasons of deletion Irak from Anti-immigrant Muslim Policies by Donald Trump. This research is an explanative descriptive study using secondary and primary data. The theory used to analyze the problem is Decision Making Theory. The results of this study explain that the removal of Iraq from the list of anti-immigrant Muslim policies in Donald Trump's time was based on two internal factors, namely, the US needs of Iraqi resources and US interests in the security sector. With the growth of the human population in the US that cannot be dammed every year, it is the reason the US needs oil and gas resources in Iraq. While in the security sector, the US believes that having a good relationship with Iraq can suppress terrorism, especially by the ISIS group.*

**Keywords:** *Muslim Immigrant Policy, Elimination, Irak, Decision Making Theory*

### **Pendahuluan**

Kebijakan anti imigran muslim adalah kebijakan yang dibuat pemerintah AS untuk warga muslim khususnya warga dari Timur Tengah yaitu, Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman. Kebijakan ini sudah ada sejak pemerintahan Obama, kebijakan yang diterapkan sejak tahun 2011 adalah melarang orang-orang dengan tindak pidana tertentu untuk memasuki AS, dan kebijakan ini tidak berlaku secara umum bagi masyarakat Timur Tengah. Namun, pada masa pemerintahan Donald Trump yang resmi menjabat pada tanggal 27 Januari 2017, kebijakan itu berubah. Kebijakan anti imigran muslim yang dikeluarkan Trump melarang seluruh warga negara dari tujuh negara tersebut untuk memasuki wilayah AS tanpa terkecuali. Kebijakan yang dibuat Donald Trump ini didasari oleh beberapa tindak terorisme yang terjadi di beberapa negara seperti serangan bom yang dilakukan oleh ISIS di beberapa tempat di kota Paris tahun 2015.

Kebijakan yang dibuat Trump ini memicu reaksi dari berbagai kalangan, baik dari pemerintahan maupun warga biasa. Pemerintah negara bagian Hawaii berpendapat bahwa kebijakan ini dianggap cacat hukum, tidak adil, dan mendiskriminatif agama, dimana hal itu sendiri bertentangan dengan Konstitusi AS. Aksi protes juga ditunjukkan warga AS dengan menggelar aksi unjuk rasa pada 28 Januari 2017 di bandara John F, Kennedy negara bagian New York AS ([www.international.kompas.com](http://www.international.kompas.com),

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maulwarman. E-mail : arisanasupianiputri.asp@gmail.com

diakses 9 April 2017). Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh beberapa negara Eropa seperti Polandia, Italia, Hungaria, serta Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Dubai. Negara-negara tersebut justru mendukung rencana Trump untuk melarang warga dari tujuh negara tersebut untuk memasuki AS demi mengurangi ancaman aksi teror (www.voaindonesia.com, diakses 30 April 2017).

Ternyata kebijakan yang dibuat Trump ini berpengaruh pada perekonomian AS khususnya pada sektor pariwisata AS. AS telah mengalami 4% penurunan pendapatan dari US\$ 193 juta menjadi US\$ 185 juta setiap bulan setelah larangan pertama yaitu dibulan januari(www.bisnis.tempo.co, diakses 20 Januari 2018). Perusahaan data perjalanan Forward Keys melaporkan setelah kebijakan itu diresmikan, penurunan pemesanan tiket perjalanan ke AS yang terbanyak adalah dari Timur Tengah. Penurunan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Perbandingan Kunjungan Pariwisata ke AS Tahun 2016 & 2017**

No	Daftar Negara	Tahun		
		2016	2017	Penurunan
1.	Timur Tengah	1,55 Juta	1,44 Juta	0,11 Juta
2.	Asia Pasifik	1,06 Juta	0,93 Juta	0,13 Juta
3.	Eropa Barat	1,34 Juta	1,23 Juta	0,11 Juta
4.	EropaTimur	1,44 Juta	1,3 Juta	0,14 Juta

Sumber : CEIC Data *Middle East Tourism*

Dari data tersebut terlihat adanya penurunan, hal ini membuktikan bahwa kebijakan ini berpengaruh terhadap kunjungan-kunjungan ke AS.

Setelah diberlakukan satu bulan, pada tanggal 1 Maret 2017, Trump mencabut Irak dari daftar tujuh negara tersebut. Kebijakan tersebut ditandatangani pada tanggal 6 Maret 2017, dan diberlakukan mulai 16 Maret 2017. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai alasan Donald Trump menghapus Irak dari daftar kebijakan Anti Imigran Muslim.

### **Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

#### ***Konsep Pengambilan Keputusan (Decision Making)***

Keputusan adalah komitmen yang berdasarkan pada analisis tentang informasi yang ada dan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan tindakan terhadap lingkungan. Adapun teori pembuatan keputusan dalam politik luar negeri suatu negara dan menjelaskan bagaimana suatu keputusan tersebut dapat terjadi. Para pembuat keputusan melakukan pilihan (seleksi) dari berbagai alternatif yang tersedia. Pembuatan keputusan meliputi upaya rekonsiliasi tujuan yang saling berlawanan, dan merupakan upaya menyesuaikan aspirasi dengan sarana yang tersedia dan mengakomodasi berbagai tujuan dan aspirasi yang berbeda dengan yang lainnya.

Dalam penjelasan lain, Graham T. Allison, mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri, yaitu (Graham Allison. 1999) :

Model I: Aktor Rasional, dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Pemerintah dianalogikan sebagai dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaah kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif tersebut. Dalam model ini digambarkan bahwa untuk melakukan pilihan-pilihan dan alternatif para pembuat keputusan menggunakan kriteria “optimalisasi hasil”.

Model II: Proses Organisasi, dalam model ini menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu organisasi besar yang berfungsi menurut suatu pola perilaku. Pembuatan keputusan bukan semata-mata proses intelektual, lebih merupakan proses mekanis. Keputusan mekanis itu dalam konteks pembuatan keputusan politik luar negeri dilakukan dengan cara mekanis yang merujuk pada keputusan-keputusan yang telah dibuat dimasa lalu, prosedur rutin yang berlaku, atau pada peran yang ditetapkan bagi unit birokrasi itu. Inilah sebagai gambaran singkat pola perilaku yang disebut prosedur kerja baku (*standard operating procedure*).

Model III: Politik Birokratik, merupakan proses tawar – menawar (*bargaining games*) antara pemerintah dengan agen pemerintah lainnya. Dimana proses tersebut merupakan proses saling mengemukakan alternatif untuk menetapkan kebijakan luar negeri atau dengan kata lain, pembuatan keputusan politik luar negeri, adalah sebuah proses sosial dan bukan merupakan proses intelektual.

Berdasarkan teori di atas, penulis menggunakan Model I Aktor Rasional karena kebijakan ini dibuat dengan sangat cepat berdasarkan pertimbangan untung rugi di bidang ekonomi dan sektor keamanan AS. Pada perekonomian, untung rugi dipertimbangkan terkait dengan eksploitasi sumber daya migas di Irak oleh AS, sedangkan di sektor keamanan terkait dengan serangan terorisme di AS. Hal ini bisa disebut juga sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional yang memusatkan pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa.

### ***Kepentingan Nasional***

Pada awalnya Morgenthau menggunakan istilah “Kepentingan Nasional” dengan berbagai cara untuk mencakup berbagai makna yang membingungkan. Hal ini dibuktikan dengan rangkaian istilah berikut : kepentingan bersama dan kepentingan yang saling bertentangan, kepentingan primer dan sekunder, minat yang tidak terbatas, minat vital, minat yang sah, minat khusus atau terbatas, minat material, kepentingan yang diperlukan variable. Namun, setelah dianalisis lebih lanjut, istilah-istilah dapat dipecah menjadi dua kategori umum untuk kepentingan nasional satu negara dan tingkat kesamaan kepentingan di antara dua atau lebih negara.

Untuk mendefinisikan lebih jelas masing-masing kepentingan yang disebutkan.

Menurut Hans J Morgenthau, kepentingan nasional terdiri dari 6 macam :

*Primary Interest*, yang meliputi perlindungan bangsa secara fisik, politik, identitas budaya dan kelangsungan hidup bangsanya terhadap gangguan dari luar. Kepentingan ini adalah suatu hal yang mutlak dan semua bangsa memiliki kepentingan ini.

*Secondary Interest*, adalah kepentingan yang tidak termasuk ke dalam *primary interest* namun kepentingan ini memberikan kontribusi terhadap *primary interest*.

*Permanent Interest*, adalah kepentingan yang relatif tetap dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kepentingan ini berubah seiring dengan berjalannya waktu, namun perubahan tersebut hanya berjalan dengan lambat.

*Variable Interest*, adalah kepentingan-kepentingan yang merupakan fungsi dari “keseluruhan kepribadian, opini publik, kepentingan setempat, partisipan politik, norma politik dan moral” yang telah ada pada suatu bangsa/negara. Dengan kata lain, kepentingan ini adalah apa yang telah ada pada bangsa/negara tersebut yang pada suatu waktu dipilih untuk dijadikan sebagai salah satu kepentingan nasionalnya, dan bisa dibedakan dari kepentingan yang bersifat primer dan permanen.

*General Interest*, yakni kepentingan-kepentingan yang bisa diselenggarakan untuk wilayah geografis yang luas, jumlah bangsa yang besar atau untuk beberapa hal yang spesifik, misalnya ekonomi, perdagangan, diplomasi, hukum internasional dan sebagainya.

*Specific Interest*, adalah kepentingan-kepentingan yang tidak termasuk dalam *general interest* dan biasanya kepentingan ini ditetapkan dalam batas waktu dan tempat serta seringkali merupakan perkembangan atau konsekuensi logis dari *general interest*.

Dari jenis kepentingan diatas, penghapusan Irak dari daftar Kebijakan Anti Imigran Muslim tersebut termasuk dalam kategori *Permanent Interest* karena kepentingan untuk mengamankan AS dari ancaman-ancaman teroris dan kepentingan untuk melangsungkan ekspor dan impor minyak di bidang ekonomi itu merupakan kepentingan yang akan selalu ada dan berkepanjangan.

### **Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskriptif – Eksplanatif. Metode Deskriptif bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai mengapa Donal Trump menghapus Irak dari Daftar Kebijakan Anti Imigran Muslim, dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah. Sedangkan metode eksplanatif bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Melakukan penelitian dalam Hubungan Internasional harus dilihat dari permasalahan yang ada kemudian dikaitkan dengan teori atau konsep yang ada dalam teori yang ada dalam Hubungan Internasional. Level analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah level analisis individu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) yaitu, yaitu mencari dan membaca buku–buku, laporan jurnal, artikel,

tabloid, koran, dan data–data internet yang memiliki tingkat kapabilitas dan validitasnya terhadap permasalahan yang dihadapi dan dipertanggungjawabkan.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Kepentingan Amerika di Timur Tengah***

Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang memiliki sedikit sumber air tawar, namun Timur Tengah memiliki kekayaan mineral yang melimpah yaitu potensi minyak yang tinggi. Di beberapa daerah Timur Tengah terutama negara-negara yang terletak di Teluk Persia seperti Saudi Arabia, Iran, Kuwait, Irak dan Uni Emirat Arab memiliki simpanan cadangan minyak yang berlimpah. Kawasan Timur Tengah menyimpan cadangan minyak lebih besar dibandingkan dengan gabungan cadangan minyak di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Amerika Utara, Amerika Tengah dan Amerika Selatan serta Eropa.

#### **Negara dengan Cadangan Minyak Bumi Terbesar Tahun 2017**

1	Venezuela	300,878 Juta Barel	25,5%
2	Saudi Arabia	266,455 Juta Barel	19,20%
3	Kanada	169,709 Juta Barel	12,94%
4	Iran	158,400 Juta Barel	10,16%
5	Irak	142,503 Juta Barel	8,5%
6	Kuwait	101,500 Juta Barel	7,5%
7	Uni Emirat Arab	97,800 Juta Barel	7,22%
8	Russia	80,000 Juta Barel	4,43%
9	Libya	48,363 Juta Barel	3,27%
10	Nigeria	37,062 Juta Barel	2,75%
11	Kazakhstan	30,000 Juta Barel	2,22%
12	Qatar	25,244 Juta Barel	1,88%
13	Cina	25,620 Juta Barel	1,42%
14	Amerika Serikat	39,230 Juta Barel	1,42%
15	Brazil	12,999 Juta Barel	0,95%

Sumber : [www.kamusdata.com](http://www.kamusdata.com)

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 8 besar negara dengan cadangan minyak terbesar merupakan negara-negara dari Timur Tengah, dan Saudi Arabia dengan total import 4.307,193 barel/tahun pada tahun 2017 lalu. Sedangkan negara lainnya adalah negara-negara yang menjalin kerjasama perdagangan dengan AS, dan mitra utama nya adalah China dengan perolehan pendapatan \$635,4M / tahun).

Nilai strategis yang ada pada Timur Tengah itulah yang membuat AS memusatkan perhatiannya secara intensif terhadap kawasan Timur Tengah. Kemudian, AS mulai mengembangkan sayapnya di kawasan penghasil minyak tersebut.

#### **Negara Timur Tengah yang Mengekspor Minyak ke AS**

<b>Negara</b>	<b>Cadangan Minyak</b>	<b>Total Expor Barel Per Day (bpd)</b>
Saudi Arabia	266,455 Juta Barel	1,28 Juta Barel
Iran	158,400 Juta Barel	2,5 Juta Barel
Irak	142,503 Juta Barel	3,98 Juta Barel

Kuwait	101,500 Juta Barel	2,2 Juta Barel
Uni Emirat Arab	97,800 Juta Barel	2,4 Juta Barel
Libya	48,363 Juta Barel	730.000 Barel
Kazakhstan	30,000 Juta Barel	2,1 Juta Barel
Qatar	25,244 Juta Barel	400.000 Barel

Sumber : Disusun oleh penulis berdasarkan dari beberapa sumber data sekunder.

Tabel diatas menunjukkan total ekspor barel per hari minyak dari timur tengah ke AS, dari tabel diatas terlihat bahwa negara Irak adalah negara dengan total ekspor minyak terbanyak. Melihat kondisi produksi minyak Irak saat ini, diyakini cadangan Irak dapat memenuhi kebutuhan produksi hingga 120 tahun. Selain ekspor dari Timur Tengah, AS juga menerima ekspor minyak dari negara lain, namun total ekspor minyaknya lebih sedikit dibanding dari negara Timur Tengah.

**Total Ekspor Minyak dari negara Timur Tengah ke AS dan total ekspor minyak dari negara lain ke AS**

Perbandingan			
Timur Tengah		Amerika Serikat	
Saudi Arabia	1,28 Juta Barel	Kanada	7,7 Juta Barel
Iran	2,5 Juta Barel	Venezuela	500.000 Barel
Irak	3,98 Juta Barel	Rusia	5,7 Juta Barel
Kuwait	2,2 Juta Barel	Nigeria	1,8 Juta Barel
Uni Emirat Arab	2,4 Juta Barel	Cina	97.700 Barel
Libya	730.000 Barel	Brazil	25.220 Barel
Kazakhstan	2,1 Juta Barel		
Qatar	400.000 Barel		

Sumber : Disusun oleh penulis berdasarkan dari beberapa sumber data sekunder.

Data diatas jelas membuktikan bahwa Timur Tengah adalah negara dengan cadangan minyak yang melimpah dibandingkan dengan negara lain. AS selalu berhasil mendapatkan konsesi untuk ikut memanfaatkan hasil bumi itu. Sejak 29 Mei 1933, *Standard Oil Company* dari California mendapatkan hak eksplorasi minyak selama 60 tahun meliputi daerah yang luas di Saudi Arabia bagian Timur (Sidik Jatmika, Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah, 2014).

Berkaitan dengan pembahasan diatas, maka tidak lepas dengan pendapatan AS pada sektor pariwisata yang sangat terpengaruh dengan Timur Tengah, hal ini pun juga termasuk kepentingan AS pada Timur Tengah. Pendapatan Pariwisata AS dilaporkan sebesar 256 USD pada 2018 ([www.ceicdata.com](http://www.ceicdata.com) diakses pada 20 Maret 2019) Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 251 USD untuk tahun 2016 & 2017. Maka pada tahun 2017 & 2018 selisih wisatawan dari Timur Tengah ke AS adalah 1,36 juta, dengan total kunjungan pada november 2018 adalah 2,8 juta wisatawan. Oleh karena itu dengan penurunan yang pernah terjadi pada tahun 2017 tersebut, maka tentu saja AS akan terus menjaga kepentingannya di Timur Tengah.

***Dinamika Hubungan AS & Irak***

AS selalu menjadikan wilayah Timur Tengah sebagai rekan politik yang sangat

penting. Dari semua negara yang ada Timur Tengah itu salah satu negara yang cukup menarik perhatian AS selama ini adalah Irak, dikarenakan cadangan minyak Irak yang diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan produksi hingga 120 tahun, dan Irak juga merupakan salah satu negara yang memiliki nilai produksi cadangan non-konvensional pada waktu yang cukup lama, selain itu yang menarik perhatian AS adalah Irak merupakan negara yang menjadi lokasi berkumpulnya para teroris. Oleh karena itu hal ini menyebabkan fluktuasi hubungan antara dua negara menjadi turun naik.

1. Hubungan Awal 1930

Hubungan diplomasi antara Irak & AS dimulai pada 9 Januari 1930 di bawah pemerintahan Muhammad Najib Ar-Ruba'i. hubungan kedua negara ini begitu dekat tepatnya ketika terjadi Perang Iran-Irak, di mana dalam perang tersebut AS menjadi sekutu bagi Irak. Namun, di sisi lain, ada pula masa di mana kedua negara justru saling bermusuhan. Hal tersebut terjadi ketika meletusnya Perang Kuwait, di mana dalam perang tersebut AS memerangi Irak untuk memukul mundur dan mengusir pasukan Irak dari Kuwait.

2. Periode Hubungan 1979-1990

Di periode ini Irak dibawah pimpinan Saddam Husein, sementara AS dalam rentang periode tersebut beberapa kali berganti pemimpin, yaitu Jimmy Carter ditahun 1979, Ronald Reagan tahun 1981-1989, dan George H.W Bush 1989-1993. Di tahun 1980 terjadi perang saudara antara Irak dan Iran, perang tersebut semakin memuncak ketika terungkap bahwa AS secara rahasia menjual senjata ke Iran selama 1985 – 1986. Namun pada tahun 1984, ketika AS meresmikan "*Operation Staunch*" untuk menghentikan pengiriman senjata ke Iran oleh negara-negara ketiga, tidak ada embargo yang dicoba terhadap Irak karena Irak telah menyatakan keinginannya untuk bernegosiasi mengakhiri perang. Semua inisiatif ini mempersiapkan dasar bagi Irak dan AS untuk membangun kembali hubungan diplomatik pada November 1984. Irak adalah negara terakhir dari negara-negara Arab untuk melanjutkan hubungan diplomatik dengan AS ([www.nytimes.com](http://www.nytimes.com) , diakses 10 Mei 2018).

3. Periode Hubungan 2001-2008

Pada periode ini AS di bawah pimpinan Presiden George W. Bush dan Irak dibawah pimpinan Saddam Hussein. Pada tanggal 11 September 2001, sekelompok teroris berhasil membajak 4 pesawat dan dari sinilah aksi teror terhadap AS dimulai. Pesawat yang dibajak tersebut ditabrakkan ke gedung-gedung berharga milik AS di mana dua pesawat ditabrakkan ke Menara *World Trade Center* (WTC) yang dianggap sebagai simbol kapitalisasi AS dan satu pesawat ditabrakkan ke Gedung Pentagon yang dianggap sebagai gedung paling aman sedunia. Pemerintah AS menduga bahwa presiden Irak, Saddam Hussein, ikut terlibat di balik aksi terorisme tersebut.

Akibat dari kejadian itu, AS melakukan pengkajian ulang strategi kebijakan luar negerinya paska Tragedi 9/11 dan hal itu tampak jelas dalam sebuah dokumen Strategi Keamanan Nasional (*National Security Strategy-NSS*) yang diterbitkan bulan September 2002. Di sana disebutkan adanya tiga prinsip penting doktrin

Bush: Pertama, mempertahankan kepemimpinan AS di dunia. Kedua, melakukan *pre-emptive attack* terhadap ancaman potensial AS. Ketiga, menyebarkan prinsip demokrasi liberal (Sidik Jatmika. Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah, 2014). Buntut dari keluarnya doktrin Bush tersebut dan adanya dugaan keterlibatan Irak dalam Tragedi 9/11 membuat AS akhirnya melakukan invasi ke Irak pada tahun 2003. Invasi Irak 2003 inilah yang menjadi puncak dari perselisihan antara AS dengan Irak sekaligus sebagai pembuka Perang Irak (Carl Conetta. "The Wages of War: Iraqi Combatant and Noncombatant Fatalities in the 2003 Conflict", 2013).

Pada saat rezim Saddam Husein itu dijatuhkan oleh AS dalam invasi tahun 2003, paska itu AS membangun pemerintahan baru di Irak yang sering dikenal dengan istilah pemerintahan boneka yang dipimpin oleh Jalal Talabani, dia adalah presiden non-Arab pertama Irak yang menjabat dari tahun 2005-2014 ([www.chinadaily.com](http://www.chinadaily.com), diakses 27 Februari 2018). Pada saat invasi tahun 2003, Jalal talabani tetap menjadi pemimpin PUK (*Patriotic United of Kurdistan*), dan ia masih dihormati oleh kalangan internasional. Setelah pemilu Irak 2005, Jalal Talabani terpilih menjadi presiden Irak dibawah pemerintahan transisi Irak oleh parlemen. Kepentingan AS di negeri itu sudah sangat jelas, yaitu agar dapat meng-intervensi perpolitikan Irak dan mengambil persediaan minyak bumi Irak. Masyarakat Irak pun mengetahui dan selalu mendesak AS untuk pergi, tetapi dengan menjalin hubungan perlahan-lahan dengan Jalal Talabani membuat seolah-olah pemerintah Irak menjadi tutup mata terhadap tuntutan rakyat Irak.

4. Periode Hubungan 2009-2012

Pada saat ini AS dibawah pemerintahan Barrack Obama yang baru menjabat pada tanggal 20 Januari 2009. Selama menjadi Presiden AS hingga dua periode, Barack Obama mendukung dan membawa AS untuk terus memerangi ISIS di Timur Tengah. Berbagai kebijakan luar negeri dan koalisi internasional pun telah dilakukan. Serangan militer dan juga diplomasi-diplomasi lainnya kerap menjadi senjata utama Obama yang menekankan demokrasi di negara-negara Timur Tengah. Obama tidak bergeser dari posisi AS dalam mengamankan dunia dari senjata pemusnah massal, bahan dasar nuklir, serta ancaman terorisme dan negara-negara yang ditengarai menyokong terorisme.

Pemerintahan Obama menarik pasukan tempur yang ada di Irak pada Agustus 2010. pada 19 Agustus 2010, brigade tempur AS terakhir keluar dari Irak. Tentara yang tersisa dialihkan dari operasi pertempuran ke kontra-terorisme dan pelatihan, perlengkapan, dan pendidikan pasukan keamanan Irak. Obama menegaskan rencananya, bahwa misi perang kebebasan Irak harus diakhiri, dan diganti dengan misi Fajar Baru yang akan menjadi tugas para diplomat. Namun, sekitar 50 ribu tentara tetap akan bertahan di Irak hingga akhir 2011. Mereka akan membantu dalam proses pembongkaran pangkalan militer dan menyelesaikan urusan logistik.

5. Periode Hubungan 2013-2016

Ini merupakan periode kedua Obama menjabat sebagai Presiden AS, sedangkan Irak telah berganti presiden, saat itu Irak dibawah Pemerintahan Fuad Masum. Muhammad Fuad Masum adalah presiden Irak ke-7. Fuad Masum mengatakan pemerintah yang baru harus melakukan koalisi yang luas untuk mengatasi



terorisme dan menjaga stabilitas keamanan negara Irak. Satu koalisi yang luas perlu dibentuk yang akan dapat melawan ideologi garis keras dan kelompok teroris, yang mengancam tidak hanya keamanan lokal tetapi juga keamanan internasional).

Obama menilai bahwa keberadaan ISIS di Timur Tengah akan menghambat proses-proses demokrasi serta kerjasama AS dengan negara-negara tersebut (Irak dan Suriah). Hingga pada periode keduanya memimpin negara adidaya tersebut, Obama menyatakan bahwa ISIS ialah musuh bersama dan harus diberantas. Pertama, AS akan melakukan serangan udara bersama Irak. Mereka akan memperluas wilayah serangan dan perlindungan bagi warga Irak, misi kemanusiaan, dan warga AS di sana. Kedua, AS akan meningkatkan serangan darat bersama pasukan Irak dan Kurdi, salah satunya dengan mengirimkan 475 pasukan tambahan.

Pasukan yang dikirim termasuk memberikan pelatihan kecerdasan dan peralatan. Sedangkan di Suriah, Obama juga akan meningkatkan kewaspadaan. Ketiga, AS akan terus mengandalkan kemampuan substansial kontra terorisme untuk mencegah serangan ISIS. Keempat, AS akan terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil tak berdosa yang telah kehilangan tempat tinggal akibat ulah ISIS. Termasuk Muslim Sunni dan Muslim Syiah yang berisiko (diserang ISIS), serta puluhan ribu orang Kristen dan minoritas agama lainnya. koalisi pimpinan AS telah menyusutkan jajaran ISIS hingga ke level dimungkinkannya serangan secara serempak terhadap posisi ISIS di Mosul, Irak, Raqqa, dan Suriah. Namun, hubungan ini menjadi sulit, ketika awal tahun 2017 setelah pergantian presiden, AS mengeluarkan kebijakan yang cukup kontroversial dengan memasukan Irak sebagai satu dari tujuh negara yang dilarang untuk masuk AS.

### ***Kebijakan Anti Imigran Muslim di Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Donald Trump***

Pemilu yang dilaksanakan pada November 2016 lalu dimenangkan oleh Donald Trump, dan resmi dilantik pada Januari 2017. Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang semua warga Irak, Iran, Libya, Sudan, Suriah, Somalia dan Yaman untuk memasuki AS. Kebijakan Anti Imigrasi Muslim adalah kebijakan yang melarang sebuah negara yang mayoritas warganya muslim untuk memasuki AS, dengan alasan agar AS aman dari ancaman terorisme. Kebijakan ini sudah ada pada masa pemerintahan Obama (2009-2016), namun kebijakan yang dibuat Obama ini bersifat khusus untuk masing-masing negara muslim tersebut, karena setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dengan isi yang berbeda satu sama lain.

Berbeda dengan Trump, kebijakan yang dibuat Trump hanya satu, namun mencakup secara keseluruhan pelarangan untuk memasuki AS bagi 7 negara dengan mayoritas muslim yaitu Irak, Iran, Libya, Sudan, Suriah, Somalia dan Yaman. Pada hari jumat 27 Januari 2017, Donald Trump menandatangani kebijakan Anti Imigran Muslim tersebut. Didalam kebijakan ini terdapat 16 bagian perintah yang mutlak harus di taati. Melihat dari hubungan diplomasi antara AS dan Irak yang sudah lama terjalin, tentu saja hal ini menjadi pertanyaan, mengapa Irak termasuk dalam daftar negara yang dilarang

untuk memasuki AS. Tetapi setelah ditinjau kembali dari dinamika hubungan AS dan Irak yang fluktuasi turun naik dan tidak bisa diprediksi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, AS dan Irak lebih cenderung berkonflik. Sehingga tidak heran pada tahun 2017 ketika isu terorisme global makin kencang, Irak masuk dalam daftar negara yang dilarang memasuki AS.

Namun pada tanggal 6 Maret 2017, Presiden Trump menandatangani kebijakan baru dengan judul yang sama, tapi mengurangi satu negara yaitu Irak. Trump mengatakan tidak ada dari enam negara lainnya yang bisa memberikan daftar identitas dan informasi keamanan mengenai warga mereka kecuali Irak. Kebijakan itu mulai berlaku tanggal 16 Maret 2017, dan dengan tegas mencabut perintah sebelumnya yang dibuat pada 27 Januari 2017. Pengecualian dapat dilakukan berdasarkan kasus perkasus, apabila hal tersebut berhubungan dengan kepentingan nasional atau orang tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan atau kesejahteraan AS.

Pengecualian dapat dilakukan berdasarkan kasus perkasus, apabila hal tersebut berhubungan dengan kepentingan nasional atau orang tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan atau kesejahteraan AS. Setelah kebijakan itu resmi diberlakukan pada tahun 2017, warga masih beranggapan bahwa kebijakan ini masih sama dengan kebijakan yang sebelumnya. Pertama, AS masih dianggap tidak adil karena masih ada negara yang dilarang untuk memasuki AS. Kedua, melihat dari cara pandang AS secara keseluruhan terhadap Irak, harusnya Irak tetap ada didalam kebijakan tersebut. Ketiga, walaupun di hapus, keadaan Irak tidak lebih baik dari sebelumnya.

Bahkan ketika Irak sudah resmi dicabut dari kebijakan tersebut pun, efek dari kebijakan tersebut masih dirasakan warga Irak yang berada di AS. Kebijakan ini juga berdampak kepada AS sendiri. Selain dari segi ekonomi yang ditandai dengan menurunnya wisatawan dari Timur Tengah yang mengakibatkan pendapatan pariwisata menurun, tetapi juga berdampak pada keadaan sosial dan politik AS.

Dampak sosial yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut adalah, dengan bertambah buruknya situasi islamofobia di AS. Kekerasan anti-Islam dan ujaran kebencian terhadap Muslim meningkat melebihi tahun setelah serangan 9/11. Situasi islamophobia ini sangat terlihat ketika warga muslim berada di bandara AS, berzikir pun menarik perhatian petugas keamanan bandara ([www.republica.co.id](http://www.republica.co.id) , diakses pada 5 Agustus 2019). Pernah salah satu warga muslim tertinggal pesawat karena harus melewati pemeriksaan khusus yang memerlukan waktu lama oleh keamanan bandara, bahkan salah satu artis Hollywood muslim Riz Ahmed yang pada bulan April lalu ingin menghadiri ajang Film *Star Wars*,dilarang terbang ke Chicago oleh organisasi keamanan AS yang bernama Homeland Security ([www.viva.co.id](http://www.viva.co.id) , diakses pada 5 Agustus 2019).

Dampak politiknya adalah muncul nya pertentangan dari negara bagian yang menolak kebijakan tersebut. Hawaii merupakan salah-satu negara bagian yang menolak kebijakan Trump tersebut, kebijakan Trump merupakan diskriminasi terhadap umat Islam, pelanggaran Konstitusi AS, dan tidak diperbolehkan di bawah undang-undang imigrasi.

Walaupun Mahkamah Agung AS pada awal pekan ini telah menerima sebagian kebijakan imigrasi Trump, tetapi menurut *Council on American Islamic Relations*, 2017 menjadi salah satu tahun terburuk di Amerika untuk umat Islam. Tentu saja hal ini bisa menimbulkan konflik antar AS dan negara bagian nya, dan tidak menutup kemungkinan akan merugikan antar negara satu dan lainnya. Selain itu kebijakan ini juga membuat para simpatisan ISIS beranggapan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut memudahkan kelompok ISIS untuk merayu muslim AS agar berpihak pada ekstrimis, bahkan dapat berpotensi memunculkan perang baru di Timur Tengah.

### ***Alasan Pencabutan Irak dari Daftar Kebijakan Anti Imigran Muslim AS***

#### **1. Kebutuhan AS Terhadap Sumber Daya Migas di Irak**

Pertumbuhan populasi manusia yang tak dapat dibendung membuat kebutuhan energi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ketersediaan minyak bumi yang seyogyanya adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan diyakini hanya sanggup bertahan di Bumi selama 300 tahun lagi. Sangat disayangkan, hanya ada beberapa negara yang memiliki cadangan minyak pada 100 tahun mendatang. Sehingga, cadangan minyak Irak menempati posisi ke empat di dunia. Melihat kondisi produksi minyak Irak saat ini, diyakini cadangan Irak dapat memenuhi kebutuhan produksi hingga 120 tahun. Irak juga merupakan salah satu negara yang memiliki nilai produksi cadangan non-konvensional pada waktu yang cukup lama ([www.dx.doi.org](http://www.dx.doi.org), diakses 25 September 2018).

Cadangan minyak Venezuela memang lebih besar dibanding Irak, tetapi dengan melihat kondisi cadangan minyak di Timur Tengah yang semakin meningkat, dapat diprediksi bahwa cadangan minyak di Timur Tengah akan lebih besar dibandingkan Venezuela ditahun-tahun mendatang. Sehingga hal itu membuat AS lebih tertarik kepada Irak dibanding Venezuela meskipun pada saat ini Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar.

Irak sebagai negara terbuka baru (pasca perang) dan pemerintah Irak membuka peluang investasi disektor migas dari investor internasional. Masih berdasarkan sumber yang sama, melihat pada *proved, probable and possible reserves* Irak diyakini memiliki cadangan migas melebihi Arab Saudi (Potensi dan Peluang Kerjasama Investasi di Irak dan *Business Scenarios Alternatives*, Kementerian Perekonomian RI, Bandung). Penghasil utama minyak di Irak terdapat di daerah ladang minyak yang berada di kawasan Kurdistan seperti Kirkuk yaitu lading Bay Hasan dan Jabur, Mosul dengan lading Ayn Zalah dan Butmah, sedangkan di wilayah Irak terdapat lading Az Zubair dan Rumailah di selatan Basrah (Muhammad Reza Pahlevi “Analysis Keamanan Minyak Di Irak Pasca Munculnya *Islamic State Of Iraq And Syria*” Skripsi . Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Lampung. 2017). Hal inilah yang menjadi alasan AS tertarik terhadap Irak, bukan hanya sumber daya minyaknya namun jalur perdagangannya .

Keterlibatan AS di Timur Tengah sejak akhir Perang Dunia II kala itu disebabkan untuk membendung pengaruh Uni Soviet di wilayah yang strategis dan kaya

akan minyak tersebut. Pada awalnya alasan keamanan masih mendasari ambisi AS untuk terlibat di Timur tengah. Sejak tahun 1945 telah terjadi kurang lebih tujuh konflik militer di wilayah Timur Tengah khususnya Irak yang melibatkan AS dan Uni Soviet AS merupakan eksportir minyak yang cukup penting di dunia. Namun, sejak tahun 1975, Minyak di Timur Tengah menjadi faktor penting bagi AS untuk mengembangkan Produksi Minyak di wilayah tersebut dikarenakan selama ini AS merupakan importir minyak terbesar di dunia. Oleh karena itu, kestabilan keamanan di Timur Tengah menjadi hal penting bagi AS guna menjamin kelancaran lalu lintas pengangkutan dan distribusi minyak dari wilayah tersebut.

Pada dasarnya memang AS memiliki sumber cadangan minyak sendiri dalam jumlah besar yang sebagian di ekspor juga, tetapi banyak sumur minyak tua yang sudah terkuras atau memerlukan teknologi yang sangat mahal untuk mengoperasikannya. Ditemukan cadangan baru di lepas pantai dan di darat, misalnya cadangan minyak di bawah perut bumi Alaska yang beku dapat dikembangkan, tetapi untuk menambangnya menghadapi berbagai kendala peraturan diantaranya undang-undang konservasi lingkungan hidup. Pada saat Saddam Husein berkuasa, perusahaan AS mencoba mengeksplorasi Migas di Irak.

Antara April 2003 hingga Desember 2004, tercatat ada 123 serangan terhadap infrastruktur energi Irak. Sekitar 7.000 kilometer sistem pipa minyak juga rusak. Irak harus memperbaiki infrastruktur tersebut dengan biaya yang tidak sedikit. Terlepas dari perusakan pipa minyak, banyak juga yang mencuri dan menyabotase pipa tersebut setelah Perang Teluk berakhir. Hal inilah yang menyebabkan mengapa ekspor minyak berhenti paska perang teluk 1 (www.khazanah.republica.co.id , diakses pada 6 Agustus 2019).

Beberapa perusahaan besar asal AS, seperti Occidental Petroleum, Exxon Mobil, Chevron, dan juga perusahaan jasa perminyakan AS termasuk Halliburton, firma berbasis di Texas telah membantu menaikkan produksi minyak Irak dalam satu dekade terakhir dari lebih dari 2,5 juta barel produksi per hari (bpd) menjadi sekitar 4,7 juta bpd (www.m.dw.com, diakses 25 September 2018).

Pada Januari 2010, perusahaan Amerika Exxon Mobil melakukan kerjasama dengan perusahaan Belanda dan mendapatkan kontrak untuk mengembangkan 9 milyar barrel ladang minyak di Irak Barat. Sementara operatornya adalah Exxon Mobil. Cadangan minyak di lapangan tersebut sebesar 16 miliar barel minyak.

#### **Jumlah Perkiraan Produksi Minyak Irak oleh Perusahaan AS**

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Total Produksi</b>
1	Occidental Petroleum	650 Ribu Barel
2	Exxon Mobil	4,1 Juta Barel
3	Chevron	2,6 Juta Barel
4	Halliburton	2,5 Juta Barel
5	ConocoPhillips	1,69 Juta Barel

Sumber:

[https://www.viva.co.id/berita/bisnis/459275-ini-20-perusahaan-minyak-terbesar-di-](https://www.viva.co.id/berita/bisnis/459275-ini-20-perusahaan-minyak-terbesar-di)

dunia-pada-2013-versi-forbes

2. Kepentingan AS Dalam Sektor Keamanan

Strategik kepentingan nasional AS di Wilayah Irak sejak tahun 1960an adalah berdasarkan tiga pilar utama, yaitu minyak, Israel dan stabilitas kawasan. Irak merupakan kawasan yang penting bagi perekonomian dan perdagangan dunia, namun interaksi AS di Irak belum terlihat dan berkembang secara signifikan, hal ini dikarenakan Inggris, Perancis dan Turki bergantian melakukan kolonisasi dan kontrol terhadap Irak, karena Irak merupakan wilayah yang tidak lepas dari negara pengembang reaktor nuklir. Sejak tahun 1970 Irak sudah mengembangkan senjata nuklirnya. Kemudian setelah Perang Teluk pada tahun 1990, Irak dipaksa takluk pada PBB atas desakan AS. Bahkan, kini sudah tak ada lagi pengembangan nuklir di Irak, setelah penyerangan terakhir yang dilakukan AS.

Pada tahun 2017, Irak dan Iran menandatangani kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama militer untuk memerangi terorisme dan ekstremisme. Selain itu kedua negara tersebut juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang membahas soal keamanan perbatasan, logistik dan pelatihan militer. Kesepakatan pertahanan antara Irak dan Iran tidak diterima dengan baik oleh AS, karena tegangan Iran-AS yang meningkat. Hubungan yang tegang antara Iran dan Irak saat ini sebenarnya cukup hangat selama masa jabatan presiden Barack Obama setelah bertahun-tahun mendapatkan sanksi dan saling tidak percaya, yang berpuncak pada kesepakatan nuklir Iran yang sangat penting. Iran setuju untuk membatasi kegiatan distribusi bahan-bahan nuklirnya sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi.

Tetapi Donald Trump selaku presiden baru AS tidak setuju dengan kesepakatan tersebut. Karena Donald Trump menganggap Iran merupakan negara yang mendukung terorisme, sehingga karena hal itu AS memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Iran. Selain itu AS juga khawatir dengan adanya kerjasama tersebut, ada kemungkinan Irak akan mengembangkan Nuklirnya kembali, melihat bahwa Iran merupakan salah satu negara pengembang Nuklir yang aktif hingga sekarang. Kemudian Iran menuduh bahwa AS telah membahayakan negaranya dengan memberlakukan sanksi-sanksi baru tersebut.

AS memiliki tujuan strategis dengan menjamin pengaruhnya secara fundamental dalam politik, pemerintahan dan keamanan Irak. Dengan kata lain, AS berusaha membentuk pemerintahan dan militer Irak yang berkiblat kepada AS. Karena wilayah Irak dinilai cukup strategis, sehingga dengan memiliki pangkalan militer yang tetap di Irak, AS dapat menekan Suriah dan Iran. Selain itu, keuntungan utama dengan memiliki pangkalan militer di Irak, AS dapat mengontrol negara-negara di Timur Tengah, yang menjaga perusahaan-perusahaan AS yang mengelola minyak di Timur Tengah.

Irak yang belum pulih dari revolusi, kini harus menghadapi suatu tantangan baru yang dilakukan oleh sebuah kelompok, yang mengatasnamakan dirinya Gerakan *Islamic State of Irak and Syriah* (ISIS). Sehingga keamanan di kedua negara (Irak dan Suriah) semakin runyam. Kelompok ini berkeinginan mendirikan sebuah

khilafah, sebuah negara yang dikuasai satu pemimpin keagamaan dan politik menurut hukum Islam atau syariah. Gerakan ISIS ini membuat negara Barat memasuki orde baru. AS menjadi semakin khawatir, apabila Irak jatuh ke tangan ISIS, maka akan menimbulkan kekacauan global, dan menyebabkan bangkrutnya ekonomi barat.

Akibat yang ditimbulkan oleh gerakan kelompok ISIS tersebut, tentu saja mendapat reaksi keras, bukan saja dari pemerintah yang berkuasa di Irak dan Suriah untuk menumpas gerakan tersebut akan tetapi juga dari pihak AS, bersama negara-negara Barat lainnya yang merasa terancam menjadi korban bagi warga negaranya. Bagi AS, sebagai negara yang memiliki kepentingan di Irak, merasa perlu melakukan upaya preventif dan refresis. Dimana upaya preventifnya adalah AS melakukan koalisis internasional sedangkan upaya refresifnya adalah AS melakukan serangan militer terhadap gerakan ISIS.

Komitmen AS dalam memerangi terorisme hingga ke akar-akarnya memang tidak diragukan lagi, yang menempatkan AS sebagai negara yang berdiri diposisi paling depan dan komitmen yang tinggi untuk memberantas aksi terorisme ([www.tempo.co](http://www.tempo.co), diakses 24 Juli 2018). Posisi AS sebagai anggota Dewan Keamanan PBB berhasil mendorong keluarnya Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1368 tanggal 12 September 2001 dan No. 1373 tanggal 28 September 2001. Resolusi Dewan Keamanan PBB itu kemudian diikuti oleh beberapa resolusi lainnya yang memerinci program aksi melawan terorisme internasional ([www.un.org](http://www.un.org), diakses 24 Juli 2018).

Keseriusan AS dalam memerangi ISIS terbukti dengan dbuatnya koalisi dari berbagai negara baik dan juga sekutu-sekutunya di didalam maupun diluar Timur Tengah. Hal ini dilakukan mengingat kekuatan ISIS baik di Irak maupun dinegara lainnya sangat besar dan memiliki tingkat militansi yang tinggi ([www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com), diakses 30 Juli 2018).

AS membutuhkan Irak untuk berkoalisi dalam memerangi ISIS. Sehingga Irak dihapuskan dari kebijakan anti imigran muslim dikarenakan adanya potensi imigran yang lebih baik dan kerjasama dalam perjuangan untuk menghancurkan ISIS. Akhirnya koalisi tersebut telah berhasil menghancurkan negara khilafah yang diklaim kelompok militan di Irak dan Suriah. Pasukan darat AS telah membantu merebut kembali wilayah ISIS di Irak dan Suriah utara, dimana sebelumnya negara tersebut telah direbut oleh ISIS. AS menyatakan bahwa negaranya akan terus meningkatkan hubungannya termasuk memberikan dukungan operasi tempur, pelatihan dan peningkatan kemampuan pasukan keamanan Irak.

Hubungan antara AS dan Irak yang pernah merenggang kini semakin membaik akibat dikeluarkannya Irak dari daftar negara yang di tidak diperbolehkan memasuki AS. Keputusan AS untuk mendekati diri dengan Irak terjadi setelah Iran dan Irak memutuskan untuk menjalin hubungan baik kembali serta berkerjasama meningkatkan keamanan kedua belah negara. Setelah kebijakan Anti Imigran bagi Irak dicabut, perusahaan-perusahaan AS semakin memiliki

privatisasi sebagian besar minyak Irak dan membuka semakin banyak Investor dari AS di Irak. Hal tersebut membuktikan tercapainya kepentingan AS di Irak.

### **Kesimpulan**

Keputusan yang dibuat oleh Presiden baru AS, Donald Trump dalam kebijakan Anti Imigran muslim mendapatkan kecaman Internasional hingga menimbulkan dampak yang signifikan bagi AS. Sebelumnya pada masa Pemerintahan Obama, kebijakan tersebut telah dibuat dan berisikan larangan orang-orang dengan tindak pidana tertentu yang berkewarganegaraan dari tujuh negara, yaitu Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman untuk memasuki AS.

Keputusan AS dilatarbelakangi oleh aksi teroris yang menyerang gedung *World Trade Center* di Washington. Kejadian tersebut dinilai bahwa pelaku teroris berasal dari negara muslim di Timur Tengah, hingga kebijakan anti Imigran Muslim dibuat untuk menekan aksi terorisme di AS pun dibuat. Kemudian meneruskan kebijakan anti imigran muslim yang ada, Donald Trump mengeluarkan isi kebijakan yang berbeda dan lebih ketat yaitu melarang seluruh warga negara dari tujuh negara tersebut untuk memasuki wilayah AS tanpa terkecuali. Akhirnya kebijakan itu resmi ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2017.

Namun, ketika kebijakan itu sudah di terapkan, pada tanggal 1 Maret 2017 AS melakukan revisi pada kebijakan tersebut, yaitu dengan menanggihkan Irak dari daftar negara yang dilarang memasuki wilayah AS. Kebijakan tersebut ditandatangani kembali pada tanggal 6 Maret 2017, dan resmi diberlakukan mulai 16 Maret 2017. Keputusan AS ini dilatarbelakangi oleh kepentingan akan sumber daya dan khususnya pada sektor keamanan. AS menilai dengan memiliki hubungan yang baik dengan Irak dapat menekan aksi terorisme khususnya yang dilakukan oleh kelompok ISIS.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Graham Allison. 1999. *Essence of Decision : Explaining the Cuban Missile Crisis, 2<sup>nd</sup> Edition*. New York : Longman
- Jatmika, Sidik . 2014. *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah* .Maharsa Publishing House : Yogyakarta

#### **Internet**

- CEIC “Pendapatan Pariwisata Amerika Serikat” , tersedia di <https://www.ceicdata.com/id/indicator/united-states/tourism-revenue>
- Chinadaily.com , “*Iraqs President Appoints Shiite as Prime Minister*” , tersedia di [chinadaily.com](http://chinadaily.com)
- Dw.com, “*Irak Undang Perusahaan Minyak Dunia*” , tersedia di <https://m.dw.com/id/irak-undang-perusahaan-minyak-dunia/a-3452526>
- Dx.doi.org ,”*The Position of Oil in the Middle East: Potential Trends*” tersedia <http://dx.doi.org/10.1080/009083190951384>.
- Gamarekian, Barbara (6 Februari 1985). “*Diplomatics Inch, Diplomatic Mile*” . *The New York Times* . Tersedia di <https://www.nytimes.com/1985/02/06/us/embassy-row-diplomatics-inch-diplomatic-mile.html>

- Khazanah.republica , “Kota Kaya Minyak” , tersedia di  
<https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/prgzzn313/kota-kaya-minyak>
- Kompas.com, “Belasan Pengungsi ditahan di Bandara JFK, Warga AS gelar Protes” tersedia di  
<http://internasional.kompas.com/read/2017/01/29/10273921/belasan.pengungsi.ditahan.di.bandara.jfk.warga.as.gelar.protes>
- Republika, “Topik Islamophobia” , tersedia di  
[https://www.republika.co.id/indeks/hot\\_topic/islamophobia\\_amerika](https://www.republika.co.id/indeks/hot_topic/islamophobia_amerika)
- Tempo.co . (8 Maret 2017)“Dampak Kebijakan AS, Turis Asing Enggan ke AS, tersedia di <https://bisnis.tempo.co/read/853763/dampak-kebijakan-trump-turis-asing-enggan-ke-as>
- Un.org ,*United Nation, Security Council “SC No. 1368”* tersedia di UN :  
<http://www.un.org/Docs/sc/committeeIs3/73>
- Viva, “Korban Islamophobia” , tersedia di  
<https://www.viva.co.id/showbiz/gossip/1161256-bintang-film-lsquo-venom-rsq-o-ternyata-pernah-jadi-korban-islamophobia>
- Voa Indonesia , “Beberapa Pemimpin Negara Asing Dukung Larangan Imigrasi Trump”, tersedia di  
<http://www.voaindonesia.com/a/pemimpin-asing-dukung-larangan-imigrasi-trump/3704585.html>
- Voa Indonesia , “Negara-negara dukung Irak Lawan Isis” , tersedia di  
<https://www.voaindonesia.com/a/negara-negara-dukung-irak-lawan-isis-/2450394.html>

### **Lainnya**

- Carl Conetta. *"The Wages of War: Iraqi Combatant and Non combatant Fatalities in the 2003 Conflict"*, 2013.
- Kementerian Perekonomian, “Potensi dan Peluang Kerjasama Investasi di Irak dan *Business Scenarios Alternatives*” Bandung.
- Muhammad Reza Pahlevi “Analisis Keamanan Minyak di Irak Pasca Munculnya *Islamic State Of Iraq and Syria*” Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Lampung 2017.